



# TINJAUAN PEREKONOMIAN



# KOTA BANDA ACEH 2014



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Banda Aceh

**TINJAUAN PEREKONOMIAN  
KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2014**

# **TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014**

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : vii + 43 halaman

Diterbitkan Oleh : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

Dicetak Oleh : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

*Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya*

## KATA PENGANTAR

Kebutuhan akan berbagai data dan informasi terhadap berbagai hasil pembangunan mutlak diperlukan oleh publik sehingga bisa didapatkan gambaran yang benar dan objektif. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi suatu daerah pun memerlukan berbagai macam data statistik guna mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Data menjadi sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka penentuan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan dimasa datang agar terwujud hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.

Publikasi ini menyajikan kajian berupa analisa dan informasi mengenai perekonomian yakni pendapatan regional dan inflasi. Publikasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memahami kegiatan perekonomian Kota Banda Aceh secara makro dalam konteks regional dan dapat pula menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh.

Kami menyambut gembira atas telah terbitnya publikasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dengan BPS Kota Banda Aceh yang telah terjalin baik dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi perencana pembangunan daerah dan masyarakat pengguna data statistik.

Banda Aceh, September 2015  
KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Banda Aceh,

**Iskandar, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19680913 199103 1 004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar Kepala Badan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
<b><u>BAGIAN PERTAMA PENDAPATAN REGIONAL</u></b>	<b>1</b>
<b>Bab I    Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Konsep dan Definisi Terkait	5
1.3 Komponen-Komponen Konsumsi Akhir	8
1.3.1 Konsumsi Rumah Tangga	8
1.3.1.1 Makanan	8
1.3.1.2 Bukan Makanan	9
1.3.2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	9
1.3.3 Konsumsi Pemerintah	10
1.3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	10
1.3.5 Perubahan Inventori	11
1.3.6 Ekspor dan Impor Barang/Jasa	11
<b>Bab II   PDRB</b>	<b>12</b>
2.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha	12
2.2 PDRB Menurut Pengeluaran	14
2.3 Pendapatan Perkapita	17
<b>Lampiran</b>	<b>18</b>
	<b>Halaman</b>
<b><u>BAGIAN KEDUA INFLASI</u></b>	
<b>Bab I    Pendahuluan</b>	<b>28</b>
1.1 Latar Belakang	28
1.2 Determinan Inflasi	29
1.3 Konsep dan Definisi Terkait	30
<b>Bab II   Inflasi Tahun 2013</b>	<b>33</b>
2.1 Inflasi Bulanan	33
2.2 Laju Inflasi	35
2.3 Perbandingan Regional	36
<b>Lampiran</b>	<b>37</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b><u>BAGIAN PERTAMA PENDAPATAN REGIONAL</u></b>	
Tabel 2.1 _____	PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kota Banda Aceh (juta rupiah), 2013-2014 12
Tabel 2.2 _____	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (juta rupiah) 2010=100, 2013-2014 14
Tabel 2.3 _____	PDRB Menurut Pengeluaran Kota Banda Aceh (juta rupiah), 2013-2014 14
Tabel 2.4 _____	PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Banda Aceh, 2010-2014 17
<b><u>BAGIAN KEDUA INFLASI</u></b>	
Tabel 2.1 _____	Inflasi Bulanan Kota Banda Aceh, Meulaboh, Kota Lhokseumawe, dan Nasional (persen), 2013 33
Tabel 2.2 _____	Perbandingan Laju Inflasi Akibat Kenaikan BBM di Kota Banda Aceh, 2005; 2008; dan 2013, serta 2014 36

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b><u>BAGIAN PERTAMA PENDAPATAN REGIONAL</u></b>	
Lampiran1	PDRB Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (jutaan rupiah), 2011-2014 19
Lampiran2	PDRB Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (jutaan rupiah), 2011-2014 20
Lampiran 3	Peranan Lapangan Usaha Terhadap Pembentukan PDRB Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2011-2014 21
Lampiran4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2014 22
Lampiran5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kota Banda Aceh (juta rupiah), 2011-2014 23
Lampiran6	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kota Banda Aceh (juta rupiah), 2011-2014 24
Lampiran7	Peranan Penggunaan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Banda Aceh, 2011-2014 25
Lampiran8	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kota Banda Aceh (persen),2011-2014 26

	<b>Halaman</b>
<b><u>BAGIAN KEDUA INFLASI</u></b>	
Lampiran1	Daftar Isian Pencacahan Harga Konsumen 38
Lampiran2	Pengelompokan Komoditas dalam Penghitungan Inflasi 40
Lampiran 3	Jumlah Barang/Jasa yang Masuk ke dalam Paket Komoditas Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Banda Aceh Menurut Kelompok Pengeluaran, (2002, 2007,2012) 41
Lampiran 4	Komoditas Volatile Goods* 42
Lampiran 5	Komoditas Administered Price* 43



**BAGIAN PERTAMA**  
*PENDAPATAN REGIONAL*

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha beserta proses terkait dengannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Arah dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat yakni dengan mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan tingkat pemerataan pendapatan yang baik. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka perlu disajikan statistik pendapatan regional/PDRB secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional dan regional maupun sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai statistik pendapatan regional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu kabupaten/kota tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan tersedianya statistik pendapatan regional secara berkala dapat diketahui antara lain :

- a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
- b. Tingkat kemakmuran suatu daerah
- c. Tingkat Inflasi dan Deflasi
- d. Gambaran struktur perekonomian

Karenanya statistik pendapatan regional merupakan gambaran dari perekonomian suatu daerah, dan akan berguna bagi para ahli yang bergerak di bidang perencanaan dan pengambilan keputusan baik yang berhubungan dengan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, pembelanjaan secara regional, perumusan perpajakan, keuangan, tenaga kerja sektoral dan lain kebijaksanaan ekonomi oleh pemerintah dan swasta.

Selain itu tidak kurang pentingnya bahwa dari penghitungan pendapatan regional dapat dilihat konsistensi berbagai macam data dari berbagai sumber, dan bila perlu menyarankan pada pengumpul data agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan.

Makin lengkap dan makin baik kualitas data yang tersedia, semakin baik pula angka-angka pendapatan regional yang disajikan. Didukung oleh konsep dan cara estimasi yang baik dan konsisten antara satu dengan yang lain, maka angka-angka pendapatan regional akan mempunyai nilai kegunaan yang cukup tinggi. Angka pendapatan regional diperoleh melalui penyusunan salah satu jenis neraca wilayah yang merupakan bagian dari sistem neraca nasional.

Sistem neraca nasional merupakan perangkat data ekonomi makro yang direkomendasi PBB untuk dikembangkan penyusunannya di seluruh negara di dunia. Sistem ini menyajikan berbagai indikator ekonomi makro dalam konsep serta format neraca terintegrasi dan konsisten. Tersedianya perangkat ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak untuk mengetahui dan mempelajari fenomena, tatanan maupun perilaku ekonomi (makro) berbagai pelaku ekonomi di masing-masing wilayah. Perilaku ekonomi yaitu produksi, konsumsi, menabung dan investasi (akumulasi) serta pemilikan kekayaan disajikan dalam satu sistem data neraca, dimana transaksi yang satu terpaut (*articulated*) dengan lainnya. Sistem neraca nasional terakhir yang dikembangkan oleh Biro Statistik PBB adalah *System of National Account 2008*.

Adopsi dari sistem neraca nasional ini akan menambah cakupan sektor-sektor yang sebelumnya belum terhitung, seperti nilai tambah biological, perubahan biaya produksi awal penanaman tanaman tahunan menjadi PMTB sekaligus nilai tambah hingga merambah sektor ekonomi yang tidak terjamah sebelumnya yakni *black/hidden economic*. Contoh dari sektor ekonomi ini adalah narkoba, judi, pelacuran, pasar ilegal, dsb.

Penghitungan PDRB merupakan jenis neraca dari sistem neraca nasional yang digunakan untuk memperoleh pendapatan regional. PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Sebagai tahun dasar yang digunakan dalam publikasi ini adalah tahun 2010.

Agregat atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat output, pergeseran, dan struktur output dari aktivitas ekonomi yang terjadi pada tahun tertentu. Hanya saja, karena angka agregat ini masih dipengaruhi inflasi/deflasi maka tidak dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun di suatu wilayah atas agregat yang diamati. Untuk itu, diperlukan agregat-agregat yang bebas dari inflasi/deflasi dengan menggunakan harga pada

tahun tertentu sebagai acuan. Tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan disebut sebagai tahun dasar dan umumnya merupakan tahun dimana aktivitas perekonomian berjalan dengan lancar.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

**a. Menurut Pendekatan Produksi**

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) lapangan usaha (sektor) yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas dan Air Bersih;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah;

**b. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB merupakan jumlah balas yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

**c. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga;
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah;
3. Pembentukan modal tetap bruto;
4. Perubahan Inventori;
5. Ekspor Neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Ketersediaan data PDRB menurut pendekatan pengeluaran secara baik, lengkap dan berkesinambungan akan dapat memberikan gambaran fenomena ekonomi tentang perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah. Dari komponen PDRB menurut penggunaan ini dapat diturunkan beberapa indikator makro diantaranya tingkat kecendrungan konsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*), ICOR (*incremental capital output ratio*), rasio pembentukan modal tetap terhadap konsumsi dan sebagainya.

Dalam proses kompilasi PDRB menurut penggunaan, dapat dihasilkan beberapa informasi agregat ekonomi makro penting yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Bahkan data agregat ini dapat pula dikombinasikan dengan variabel sosial lainnya dalam analisis perilaku sosial ekonomi yang lebih komplit. Informasi yang diturunkan tersebut diantaranya meliputi :

- a. Besaran nominal yaitu besaran yang menggambarkan besarnya nilai moneter barang dan jasa yang dikonsumsi dan diinvestasi dalam bentuk pembentukan modal fisik dan yang diekspor
- b. Untuk mengetahui porsi dari produk yang dihasilkan di wilayah domestik, maka nilai tersebut harus dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang berasal dari impor
- c. Peranan atau struktur kontribusi masing-masing komponen penggunaan akhir yang dinyatakan dalam satu satuan rasio (proporsi). Dalam struktur ini dapat dianalisis perbandingan atau perubahan komponen konsumsi akhir antar waktu
- d. Pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang persentase perubahan konsumsi akhir barang dan jasa pada satu waktu terhadap waktu sebelumnya. Dinyatakan dalam ukuran volume, baik pada masing-masing komponen maupun total dengan nilai pada tahun sebelumnya (dua periode secara berturut-turut). Pertumbuhan yang diturunkan dari hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan ini merupakan perhitungan indeks berantai dari satu waktu (tahun) terhadap waktu sebelumnya dalam suatu periode waktu tertentu.
- e. Indek implisit merupakan angka indeks perkembangan harga yang diperoleh dengan cara membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan, untuk masing-masing komponen PDRB menurut penggunaan. Secara implisit angka indeks ini menjelaskan tentang perubahan harga berbagai produk barang/jasa digunakan masyarakat sebagai konsumsi akhirnya.

## 1.2 Konsep dan Definisi Terkait

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan agregat atas nilai tambah dari keseluruhan aktivitas ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi di suatu wilayah atau daerah dan terjadi pada kurun waktu tertentu.

**Produk Regional Bruto** merupakan PDRB ditambah dengan pendapatan netto dari luar wilayah atau daerah. Pendapatan netto ini merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk kota ini yang diterima dari luar wilayah dan dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk luar wilayah atau daerah.

**Produk Regional Netto** merupakan Produk Regional Bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

**Produk Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor produksi** adalah produk regional netto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tak langsung netto. Pajak tak langsung netto sendiri merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Faktor pendapatan netto dari luar wilayah atau daerah ini untuk sementara diasumsikan sama dengan nol, sehingga dalam hal ini PDRN ( Produk Domestik Regional Netto) atas dasar biaya faktor produksi dianggap sebagai pendapatan regional).

**Pendapatan regional per Kapita** masing-masing wilayah merupakan pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

**PDRB per kapita** merupakan rata-rata potensi yang dapat diperoleh berbagai produk barang dan jasa yang tersedia baik domestik maupun impor setiap penduduk di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya. Angka ini diperoleh dari pembagian PDRB atas jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

**Wilayah Ekonomi** adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintah (negara)

**Ekonomi Domestik** adalah kegiatan ekonomi yang terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah yang dibedakan dengan luar daerah berdasarkan konsep residen, bukan karena unsur kedaerahan yang dilakukan oleh unit-unit institusi ekonomi yang dikelola oleh residen

**Residen** adalah unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi dalam batas ekonomi suatu daerah dan lama tinggal yang relatif panjang (satu tahun)

**Produk** adalah output yang dihasilkan oleh suatu proses produksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di wilayah domestik pada suatu waktu tertentu

**Produk Domestik** adalah nilai akhir produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam sistem ekonomi domestik setelah diperhitungkan dengan nilai barang dan jasa yang berasal dari impor

**Neraca produksi** adalah neraca dasar yang disajikan dalam format "T" yang berisikan data tentang perilaku dan proses produksi yang alur prosesnya terdiri dari input, transformasi, serta keluaran

**Domestik** adalah batas teritorial kegiatan ekonomi yang hampir mendekati konsep wilayah teritorial suatu negara hukum (batas administrasi)

**Nasional dan Regional**, PDRB adalah segmen PDB nasional berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi yang mengacu pada wilayah administrasi pemerintah yang berlaku

**PDRB dan PDRN**, PDRB merupakan produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik yang dibedakan dengan PDRN karena unsur penyusutan. PDRB dikurangi dengan penyusutan sama dengan Produk Domestik Regional Neto (PDRN).

**Ekspor Barang dan Jasa**, meliputi seluruh transfer dan penjualan barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri.

**Impor Barang dan Jasa**, meliputi seluruh transfer dan pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya yang dilakukan baik dalam wilayah domestik maupun di luar negeri.

**Defisit/surplus perdagangan** merupakan selisih transaksi perdagangan barang dan jasa domestik dengan wilayah lain atau disebut juga sebagai ekspor neto. Surplus terjadi apabila ekspor lebih besar dari impor dan bila sebaliknya disebut dengan defisit.

**Biaya Antara** adalah input habis pakai yang dipergunakan dalam proses produksi dan terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa, baik yang dibeli dari pihak lain ataupun yang diproduksi sendiri.

**Faktor Produksi** adalah faktor-faktor yang terlibat langsung dalam suatu proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian.

**Faktor Pendapatan Dari Luar** adalah pendapatan/kompensasi yang diterima oleh faktor produksi, atas keterlibatannya dalam suatu proses produksi luar batas wilayah domestik.

**Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan atau yang dikonsumsi, pada harga tahun berjalan.

**Harga Konstan** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan atau yang dikonsumsi, pada harga tetap di satu tahun dasar.

**Pajak Tidak Langsung Neto** adalah pajak tidak langsung dikurangi subsidi.

**Imputasi Jasa** merupakan perkiraan atas nilai output jasa yang dihasilkan, seperti imputasi jasa bank, jasa asuransi, jasa dana pensiun dan sebagainya.

**Margin Perdagangan Dan Biaya Transport** merupakan selisih nilai transaksi harga pembeli dengan tingkat produsen. selisih ini berupa keuntungan pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang eceran dan biaya transport yang timbul dalam menyalurkan barang dari produsen kepada pembeli.

**Input Primer**, disebut juga nilai tambah bruto, terdiri dari balas jasa tenaga kerja, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto.

**Output Domestik** adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi tanpa membedakan pelaku produksinya di wilayah domestik tertentu.

**Pelengkap (Mark Up)** merupakan besaran persentase tertentu yang ditambahkan terhadap suatu bilangan estimasi yang fungsinya untuk melengkapi data yang tidak lengkap.

**Penyusutan** adalah penyusutan barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

**Permintaan Antara** adalah permintaan barang dan jasa untuk memenuhi proses produksi.

**Permintaan Akhir** adalah permintaan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor.

**Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. adanya tahun dasar tersebut dapat menggambarkan data series dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Pada umumnya dikenal 4 (empat) cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

**Revaluasi**, dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan tingkat pada tahun dasar 2000, dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil selisih antara biaya antara hasil perhitungan tersebut.

**Ekstrapolasi**, Nilai tambah pada masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi, sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap atas dasar harga konstan.

**Deflasi**, Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga konsumen, indeks perdagangan besar dan sebagainya. Indeks harga tersebut dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar konstan.

**Deflasi Berganda**, dalam deflasi berganda ini, yang dideflasikan adalah output dan biaya antaranya sekaligus, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil proses deflasi berganda tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar yang digunakan sesuai dengancakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen antara terbesar.

### **1.3 Komponen-komponen Konsumsi Akhir**

#### **1.3.1 Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung selama satu tahun.

Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah tangga, digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. Selanjutnya perkiraan data konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, serta penyempurnaan estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumah tangga didasarkan pada data Susenas, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun dimana data Susenas belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

##### **1.3.1.1 Makanan**

Model yang digunakan untuk kelompok makanan adalah fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola. Bentuk fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

dimana,

$Q_i$ = rata-rata konsumsi per kapita sebulan (kuantum)

$Y_i$ = pendapatan per kapita sebulan (rupiah)

$a$ = konstanta

$b$ = koefisien elastisitas

$i$ = kelompok pendapatan per bulan

### 1.3.1.2 Bukan Makanan

Model yang digunakan untuk kelompok bukan makanan adalah regresi linier. Artinya setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan. Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Q_i = a + b \cdot Y_i$$

dimana,

$Q_i$ = rata-rata konsumsi per kapita sebulan (kuantum)

$Y_i$ = pendapatan per kapita sebulan (rupiah)

$a$ = konstanta

$b$ = koefisien elastisitas

$i$ = kelompok pendapatan per bulan

### 1.3.2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta yang tidak menerima untung (nirlaba) adalah lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat seperti organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi politik, badan keagamaan, lembaga penelitian, pendidikan, kesehatan, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang khusus melayani masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan/nonkomersial.

Yang dimaksud dengan nonkomersial adalah lembaga nirlaba yang menjual jasa layanannya pada tingkat di bawah harga pasar, yaitu harga yang didasarkan atas biaya produksi, bahkan kadangkala layanan yang diberikan dengan cuma-cuma.

Konsumsi lembaga swasta nirlaba meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak tak langsung netto dikurangi dengan penjualan barang bekas. Pada umumnya sumber pembiayaan dari lembaga ini berasal dari sumbangan dan bantuan perorangan, masyarakat, organisasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah. Apabila bantuan dana dan

pengawasan sepenuhnya atau sebagian besar dari pemerintah maka lembaga ini dimasukkan ke dalam konsumsi pemerintah.

### **1.3.3 Konsumsi Pemerintah**

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan untuk estimasi konsumsi pemerintah pusat. Realisasi pengeluaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa yang dikumpulkan oleh BPS untuk konsumsi pemerintah daerah. Namun data yang tersedia dua tahun ke belakang sehingga ada angka sementara dan angka sangat sementara. Besarnya penyusutan diperkirakan lima persen dari jumlah belanja pegawai.

Perkiraan pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 untuk belanja pegawai dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan penimbang jumlah pegawai negeri. Sedangkan untuk belanja barang dengan cara deflasi yaitu dengan menggunakan IHPB umum tanpa ekspor.

### **1.3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

Metode yang dipakai dalam penghitungan PMTB adalah pendekatan institusi. Menurut institusi, PMTB terdiri dari PMTB pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) serta usaha swasta lainnya (termasuk usaha rumah tangga).

Data yang digunakan pada publikasi ini adalah data pengeluaran konstruksi pemerintah dan jumlah unit kendaraan. Perkiraan PMTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara deflasi dengan menggunakan IHPB umum tanpa ekspor.

### 1.3.5 Perubahan Inventori

Pada publikasi sebelumnya, perubahan inventori dihitung dengan cara residual atau membuang selisih atau perbedaan antara total PDRB sektoral dengan total PDRB penggunaan.

Dengan demikian pada komponen ini selain mencakup perubahan stok atau inventori termasuk juga diskrepansi statistik. Perubahan inventori merupakan komponen penting dalam penghitungan investasi, maka mulai saat ini komponen ini dihitung secara terpisah.

Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai posisi inventori pada akhir tahun dikurangi dengan nilai posisi pada awal tahun pada waktu yang sama. Oleh karena itu dalam pengukurannya perubahan inventori dapat bertanda positif atau negatif. Positif dalam arti terjadi penambahan barang inventori, sedangkan negatif apabila terjadi pengurangan barang inventori dari persediaan (stok) yang ada.

Sumber data yang digunakan dari hasil survei Industri Besar Sedang (IBS) dan Survei Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) BPS. Perkiraan perubahan inventori atas dasar harga konstan 2010 adalah dengan men-*deplate* nilai perubahan inventori dengan IHPB umum tanpa ekspor.

### 1.3.6 Ekspor dan Impor Barang/Jasa

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain, yang meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Termasuk juga dalam ekspor adalah pembelian langsung atas barang dan jasa di wilayah domestik oleh penduduk negara lain. Sebaliknya pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk Indonesia dimasukkan sebagai impor. Data yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber yaitu : Statistik Ekspor dan Impor BPS, Bank Indonesia, Kementerian Pertambangan dan Energi dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board (fob)*, sedangkan impor menurut *cost insurance freight (cif)*. Kurs dollar AS (dari Bank Indonesia) untuk ekspor menggunakan rata-rata kurs beli yang tertimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan, sedangkan untuk impor menggunakan rata-rata kurs jual yang tertimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan.

## BAB II PDRB

### 2.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

**P**DRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai 14,09 trilyun rupiah. Nilai ini menunjukkan peningkatann bila dibandingkan dengan tahun sebelum yakni pada tahun 2013 yang baru mencapai 12,75 trilyun rupiah. Peningkatan untuk harga berlaku ini juga sejalan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang juga mengalami peningkatan dari 11,64 trilyun rupiah pada tahun 2013 menjadi 12,24 trilyun rupiah di tahun 2014.

**Tabel : 2.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kota Banda Aceh (juta rupiah), 2013-2014**

Sektor	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	124.573,3	130.570,6	115.865,2	118.552,4
2. Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Industri Pengolahan	268.230,8	309.526,6	244.114,1	260.755,0
4. Pengadaan Listrik dan Gas	32.502,3	34.142,4	37.212,2	38.898,8
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.040,7	11.139,5	9.843,8	10.815,1
6. Konstruksi	950.082,6	1.010.238,1	869.894,3	859.192,1
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.948.899,8	3.339.382,8	2.659.857,3	2.854.062,1
8. Transportasi dan Pergudangan	1.998.171,9	2.194.470,4	1.759.609,3	1.821.139,5
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	330.348,8	377.051,5	296.942,3	326.288,8
10. Informasi dan Komunikasi	942.579,2	999.810,2	1.030.141,2	1.093.525,3
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	390.108,8	395.302,6	323.432,4	312.756,4
12. Real Estate	661.447,4	745.077,6	631.969,6	686.703,3
13. Jasa Perusahaan	297.493,0	332.106,6	257.111,0	277.552,6
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.510.331,4	2.778.681,1	2.210.707,5	2.291.306,5
15. Jasa Pendidikan	669.443,4	743.857,0	624.101,7	670.937,6
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	422.781,4	468.777,1	385.899,8	414.921,1
17. Jasa lainnya	201.303,2	222.282,7	192.874,6	205.760,1
<b>PDRB</b>	<b>12.758.338,0</b>	<b>14.092.416,8</b>	<b>11.649.576,2</b>	<b>12.243.166,7</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Menurut harga berlaku, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi yang dominan dalam struktur PDRB Kota Banda Aceh pada tahun 2014. Bersama sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; serta sektor Konstruksi, keempatnya masing-masing menyumbang lebih dari 1 triliun rupiah.

Hal ini sejalan dengan telah ditinggalkannya sektor pertanian dan ketidakmampuan sektor industri pengolahan dalam menopang perekonomian Kota Banda Aceh. Bila ditelusuri lebih jauh, kontribusi keempat sektor tersebut terjadi tidak lepas dengan posisi Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh di mana sektor jasa lah yang memegang perananan.

Selain digunakan sebagai barang konsumsi oleh masyarakat Kota Banda Aceh, sebagian barang yang masuk ke Kota Banda Aceh sebagai barang grosir juga kembali didistribusikan kepada kabupaten-kabupaten terdekat seperti Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Jaya untuk dijual kepada konsumen langsung. Keberadaan dua *mall* besar di Kota Banda Aceh yakni Hermes Mall dan Suzuya Mall semakin meningkatkan intensitas penduduk dari kabupaten sekitar untuk berbelanja di Kota Banda Aceh.

Sektor pariwisata yang terus menggeliat di Kota Banda Aceh juga berpengaruh terhadap sektor-sektor terkait. Perdagangan, Hotel dan Restaurant, Transportasi, mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sinergisitas dengan sektor pariwisata dan kemudahan berbelanja sejak kehadiran kedua pusat perbelanjaan tadi mengakibatkan output sektor perdagangan terus mengalami peningkatan. Pada gilirannya sektor perdagangan menjadi sektor terbesar penyumbang PDRB Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh sebagai pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas pemerintahan Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, serta berbagai instansi vertikal seperti Kodam Iskandar Muda; Polda Aceh, Perwakilan di daerah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan lembaga lainnya. Hal ini menjadikan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi yang besar kepada daerah basis. Tidak menjadi suatu hal yang aneh bila kontribusi sektor ini mencapai 2,7 triliun rupiah kepada Kota Banda Aceh.

**Tabel : 2.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (juta rupiah) 2010=100, 2013-2014**

Sektor (1)	Harga Konstan	
	2013 (2)	2014 (3)
1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,98	0,93
2.Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0
3.Industri Pengolahan	2,10	2,20
4.Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,24
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08
6.Konstruksi	7,45	7,17
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,11	23,70
8.Transportasi dan Pergudangan	15,66	15,57
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,59	2,68
10.Informasi dan Komunikasi	7,39	7,09
11.Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	2,81
12.Real Estate	5,18	5,29
13.Jasa Perusahaan	2,33	2,36
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,68	19,72
15.Jasa Pendidikan	5,25	5,28
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,31	3,33
17. Jasa lainnya	1,58	1,58
<b>PDRB</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Secara persentase, lebih dari setengah PDRB Kota Banda Aceh berasal dari hanya tiga sektor yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Transportasi dan Pergudangan. Ketiga sektor tersebut berkontribusi sebanyak 58,45 persen atas PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2013 dan meningkat menjadi 58,99 persen di tahun 2014.

## 2.2 PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

Pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh 9 (sembilan) sektor produksi adalah untuk keperluan bahan produksi (*intermediate input*) dan juga untuk keperluan konsumsi akhir

(*final consumption/demand*). Ditinjau dari sisi lokasi geografi, penggunaan barang dan jasa konsumsi akhir dibedakan menjadi keperluan domestik dan untuk keperluan luar wilayah.

Untuk keperluan domestik penggunaannya adalah untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, serta perubahan inventori. Sedangkan untuk keperluan luar wilayah, penggunaannya adalah untuk keperluan ekspor, baik antar provinsi maupun antar negara.

Pada kenyataannya barang dan jasa konsumsi akhir yang beredar dalam wilayah Kota Banda Aceh, ada juga yang berasal dari luar wilayah Kota Banda Aceh. Oleh karena itu ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, yakni ekspor dikurangi impor.

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2014 ini sebagian besar berasal dari konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran untuk Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba masih kecil sumbangannya dalam penciptaan nilai tambah bruto. (Tabel 2.3).

**Tabel : 2.3 PDRB Menurut Pengeluaran Kota Banda Aceh (juta rupiah) 2010=100, 2013-2014**

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga	<b>7.322.294,78</b>	<b>8.142.820,46</b>	<b>6.136.847,93</b>	<b>6.375.428,40</b>
Makanan	2.151.264,10	2.327.549,98	1.862.469,32	1.921.213,03
Non Makanan	5.171.030,67	5.815.270,48	4.274.378,61	4.454.215,37
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	<b>141.955,60</b>	<b>189.167,83</b>	<b>133.765,84</b>	<b>166.765,90</b>
Konsumsi Pemerintah	<b>8.699.481,86</b>	<b>9.015.279,29</b>	<b>6.264.800,59</b>	<b>6.298.716,99</b>
Pembentukan Modal Tetap Bruto	<b>2.991.633,68</b>	<b>3.227.141,07</b>	<b>2.597.860,10</b>	<b>2.599.337,62</b>
Perubahan Inventori	<b>4.183,92</b>	<b>-59,07</b>	<b>-2.158,88</b>	<b>-53,30</b>
Net Ekspor	<b>-6.401.211,82</b>	<b>-6.481.932,73</b>	<b>-3.481.539,36</b>	<b>-3.197.028,88</b>
<b>PDRB</b>	<b>12.758.338,01</b>	<b>14.092.416,84</b>	<b>11.649.576,2</b>	<b>12.243.166,7</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Sebagai daerah bukan penghasil komoditas pertanian maupun industri pengolahan yang besar, posisi sebagai ibukota Provinsi Aceh merupakan suatu anugerah bagi wilayah ini. Walaupun memiliki net ekspor yang sangat negatif karena sebagian besar konsumsi diperoleh dari barang-barang impor luar daerah/negeri, kekurangan tersebut dapat ditutupi berkat kontribusi komponen Konsumsi Pemerintah. Tanpa status sebagai ibukota provinsi, tentu akan sangat berat mengangkat perekonomian Kota Banda Aceh.

Mengalirnya dana otonomi khusus ke Provinsi Aceh, sebagai eksekusi dari MOU Helsinki 2006, meningkatkan belanja Pemerintah Aceh baik belanja langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut jelas berpengaruh kepada Kota Banda Aceh karena sebagian dana tentu akan mengalir terlebih dahulu ke daerah ini. Selain belanja pegawai yang mengalami kenaikan signifikan, beberapa tahun terakhir belanja modal juga semakin besar dikururkan baik untuk belanja infrastruktur maupun non infrastruktur yang sangat diperlukan untuk menggenjot pembangunan.

Perubahan wilayah Kota Banda Aceh beberapa tahun terakhir dimana terjadi pembuatan jalan baru, peningkatan jalan, pelebaran jalan di berbagai sudut kota, pembangunan saluran air buang merupakan sebagian dari hasil belanja Pemerintah Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh yang semakin besar. Tentu saja perubahan wilayah tersebut menjadikan wilayah Kota Banda Aceh semakin terbuka untuk menjadi tempat aktivitas perekonomian.

Saat ini hampir semua lahan yang berada di pinggir jalan besar telah beralih fungsi menjadi lahan pertokoan ataupun perkantoran. Warung kopi meningkat pesat sejak beberapa tahun terakhir baik dalam bentuk konvensional maupun modern. Dealer kendaraan bermunculan, pusat perbelanjaan baru lahir menjawab kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh yang juga membutuhkan tempat perbelanjaan modern. Geliat aktivitas perekonomian tersebut yang lahir sebagai akibat keterbukaan Kota Banda Aceh ini juga muncul seiring dengan konsumsi rumah tangga yang semakin besar.

Konsumsi rumah tangga di Kota Banda Aceh didominasi oleh konsumsi non makanan, suatu pertanda daerah yang telah menjadi kota secara sesungguhnya. Walaupun konsumsi makanan terutama makanan jadi yang tetap meningkat dari tahun ke tahun, laju peningkatan konsumsi non makanan jauh lebih besar. Bukan lagi menjadi pemandangan yang aneh terjadi di Kota Banda Aceh ketika kemacetan terjadi di beberapa tempat terutama pagi hari pada saat jam pergi kantor dan masuk anak sekolah serta sore hari selepas jam kantor.

Hal ini terjadi karena terus bertambahnya kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua dan empat. Kemudahan untuk memiliki kendaraan dalam skema kredit dan bertambahnya masyarakat golongan menengah baru mengakibatkan konsumsi masyarakat

secara keseluruhan meningkat. Pusat perbelanjaan lahir belakangan ini penuh dengan pengunjung pada akhir pekan. Setidaknya belanja yang dahulu sering dilakukan ke luar daerah (Medan) dapat berkurang dengan pusat perbelanjaan baru yang lebih dekat. Geliat ekonomi pun akhirnya lebih terasa di kota ini.

Meski demikian, konsumsi atas barang yang tidak diproduksi di wilayah sendiri tentu saja menyebabkan impor harus terjadi. Walaupun industri pengolahan di Kota Banda Aceh, terutama industri makanan dan minuman, tetap menunjukkan kinerja peningkatan namun besaran kenaikan konsumsi barang masih lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan net ekspor yang terus negatif dari Rp 6,401 trilyun menjadi Rp 6,418 trilyun.

Sesungguhnya, kenaikan ini lebih dipengaruhi inflasi akibat kenaikan harga barang yang dikonsumsi. Bila dilihat dengan harga konstan, net ekspor yang negatif justru menurun sebesar 8,17 persen pada tahun 2014 menjadi 3,19 trilyun. Inflasi di atas 5 persen dialami Kota Banda Aceh sejak tahun 2013 setelah sebelumnya mencatat inflasi 0,06 persen di tahun 2012.

### 3.3 Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 mencapai 56,483 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat 10,36 persen dari tahun sebelumnya bila menggunakan dasar harga berlaku namun hanya naik sebesar 3,95 persen bila menggunakan dasar harga tahun 2010. Sejak tahun 2012, laju pertumbuhan PDRB perkapita sedikit stagnan di kisaran 3,9 persen.

Tabel : 2.4 PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Banda Aceh 2010=100, 2010-2014

Sektor	ADHB (Rp)	Pertumbuhan (%)	ADHK (Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	45,031	-	45,031	-
2011	47,058	4,50	46,022	0,85
2012	48,475	3,01	46,383	3,97
2013	51,180	5,58	46,733	3,91
2014	56,483	10,36	49,071	3,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1.****PDRB Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor (jutaan rupiah), 2011-2014**

<b>Sektor</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111.143,96	117.403,20	124.573,32	130.570,57
2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Industri Pengolahan	222.234,47	242.323,73	268.230,82	309.526,60
4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.804,06	32.100,02	32.502,29	34.142,38
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.271,92	9.161,21	10.040,66	11.139,54
6. Konstruksi	928.157,31	934.143,90	950.082,62	1.010.238,10
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.338.995,95	2.619.273,12	2.948.899,81	3.339.382,81
8. Transportasi dan Pergudangan	1.785.687,44	1.833.820,21	1.998.171,86	2.194.470,40
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252.420,72	285.854,95	330.348,83	377.051,52
10. Informasi dan Komunikasi	872.863,05	900.348,53	942.579,19	999.810,18
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	285.812,97	328.004,72	390.108,79	395.302,62
12. Real Estate	562.535,93	608.221,20	661.447,40	745.077,64
13. Jasa Perusahaan	231.505,98	260.880,49	297.492,96	332.106,61
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.025.855,29	2.225.309,28	2.510.331,40	2.778.681,10
15. Jasa Pendidikan	575.903,83	606.128,90	669.443,40	743.857,01
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	351.897,37	387.603,71	422.781,44	468.777,08
17. Jasa lainnya	170.470,49	183.399,64	201.303,22	222.282,66
<b>PDRB</b>	<b>10.755.560,76</b>	<b>11.573.976,82</b>	<b>12.758.338,01</b>	<b>14.092.416,84</b>

**Lampiran 2.****PDRB Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor (jutaan rupiah), 2011-2014**

<b>Sektor</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107.186,82	111.401,17	115.865,18	118.552,38
2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Industri Pengolahan	213.627,15	228.900,62	244.114,08	260.755,04
4. Pengadaan Listrik dan Gas	33.182,68	36.175,95	37.212,18	38.898,85
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.230,77	8.981,58	9.843,79	10.815,09
6. Konstruksi	904.766,87	882.313,45	869.894,32	859.192,12
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.229.766,65	2.451.964,61	2.659.857,32	2.854.062,05
8. Transportasi dan Pergudangan	1.744.005,71	1.753.677,16	1.759.609,30	1.821.139,53
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	247.187,31	270.815,71	296.942,26	326.288,76
10. Informasi dan Komunikasi	916.295,46	978.214,40	1.030.141,20	1.093.525,30
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	272.538,72	286.301,24	323.432,36	312.756,40
12. Real Estate	552.136,19	588.859,47	631.969,61	686.703,27
13. Jasa Perusahaan	222.728,49	239.100,92	257.111,02	277.552,63
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.991.988,50	2.103.986,78	2.210.707,50	2.291.306,48
15. Jasa Pendidikan	568.543,60	592.927,92	624.101,68	670.937,59
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	335.526,31	359.403,42	385.899,81	414.921,12
17. Jasa lainnya	171.137,93	181.655,75	192.874,60	205.760,12
<b>PDRB</b>	<b>10.518.849,16</b>	<b>11.074.680,15</b>	<b>11.649.576,21</b>	<b>12.243.166,73</b>

**Lampiran 3.****Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2010-2013**

<b>Sektor</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,03	1,01	0,98	0,93
2. Pertambangan dan Penggalan				
3. Industri Pengolahan	2,07	2,09	2,10	2,20
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,28	0,25	0,24
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08
6. Konstruksi	8,63	8,07	7,45	7,17
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,75	22,63	23,11	23,70
8. Transportasi dan Pergudangan	16,60	15,84	15,66	15,57
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,35	2,47	2,59	2,68
10. Informasi dan Komunikasi	8,12	7,78	7,39	7,09
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,66	2,83	3,06	2,81
12. Real Estate	5,23	5,26	5,18	5,29
13. Jasa Perusahaan	2,15	2,25	2,33	2,36
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,84	19,23	19,68	19,72
15. Jasa Pendidikan	5,35	5,24	5,25	5,28
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,27	3,35	3,31	3,33
17. Jasa lainnya	1,58	1,58	1,58	1,58
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran 4.****Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh Menurut Sektor (persen), 2010-2013**

<b>Sektor</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,45	3,93	4,01	2,32
2. Pertambangan dan Penggalan				
3. Industri Pengolahan	5,15	7,15	6,65	6,82
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4,43	9,02	2,86	4,53
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,76	9,12	9,60	9,87
6. Konstruksi	-2,73	-2,48	-1,41	-1,23
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,35	9,97	8,48	7,30
8. Transportasi dan Pergudangan	0,56	0,55	0,34	3,50
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,58	9,56	9,65	9,88
10. Informasi dan Komunikasi	6,67	6,76	5,31	6,15
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,35	5,05	12,97	-3,30
12. Real Estate	6,82	6,65	7,32	8,66
13. Jasa Perusahaan	6,60	7,35	7,53	7,95
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,64	5,62	5,07	3,65
15. Jasa Pendidikan	5,06	4,29	5,26	7,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,07	7,12	7,37	7,52
17. Jasa lainnya	6,06	6,15	6,18	6,68
<b>PDRB</b>	<b>4,54</b>	<b>5,28</b>	<b>5,19</b>	<b>5,10</b>

**Lampiran5.****PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kota Banda Aceh (juta rupiah),2010-2013**

<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga	6.135.353,98	6.616.270,07	7.322.294,78	8.142.820,46
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	120.254,24	123.270,60	141.955,60	189.167,83
Konsumsi Pemerintah	6.089.311,39	6.829.555,58	8.699.481,86	9.015.279,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.757.907,84	3.007.278,53	2.991.633,68	3.227.141,07
Perubahan Inventori	19.901,53	432.950,67	4.183,92	-59,07
Net Ekspor	-4.367.168,23	-5.435.348,63	-6.401.211,82	-6.481.932,73
<b>PDRB</b>	<b>10.755.560,76</b>	<b>11.573.976,82</b>	<b>12.758.338,01</b>	<b>14.092.416,84</b>

**Lampiran6.****PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kota Banda Aceh (juta rupiah),2010-2013**

<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga	5.710.598,11	5.918.807,46	6.136.847,93	6.375.428,40
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	116.363,55	122.164,79	133.765,84	166.765,90
Konsumsi Pemerintah	5.320.206,81	5.733.047,66	6.264.800,59	6.298.716,99
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.660.760,57	2.664.985,67	2.597.860,10	2.599.337,62
Perubahan Inventori	40.575,54	350.955,19	-2.158,88	-53,30
Net Ekspor	-3.329.655,42	-3.715.280,62	-3.481.539,36	-3.197.028,88
<b>PDRB</b>	<b>10.518.849,16</b>	<b>11.074.680,15</b>	<b>11.649.576,21</b>	<b>12.243.166,73</b>

**Lampiran 7.**

**Peranan Komponen Penggunaan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Banda Aceh, 2011-2014**

<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga	57,04	57,17	57,39	57,78
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,12	1,07	1,11	1,34
Konsumsi Pemerintah	56,62	59,01	68,19	63,97
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,64	25,98	23,45	22,90
Perubahan Inventori	0,19	3,74	0,03	0,00
Net Ekspor	(40,60)	(46,96)	(50,17)	(46,00)
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran8.**

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kota Banda Aceh (persen),  
2011-2014**

<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga	4,31	3,65	3,68	3,89
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	3,76	4,99	9,50	24,67
Konsumsi Pemerintah	0,55	7,76	9,28	0,54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,17	0,16	-2,52	0,06
Perubahan Inventori	-43,43	764,94	-100,62	-97,53
Net Ekspor	-7,69	11,58	-6,29	-8,17
<b>PDRB</b>	<b>4,54</b>	<b>5,28</b>	<b>5,19</b>	<b>5,10</b>



## BAGIAN KEDUA

# *INFLASI*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Inflasi merupakan salah satu masalah yang terkadang menjadi penyakit di dalam perekonomian. Oleh karenanya inflasi harus dipikirkan dalam perencanaan pembangunan. Inflasi merupakan indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Ketika terjadi inflasi, yang sering terjadi adalah bagi mereka yang berada di kelompok penduduk miskin tidak mengalami peningkatan pendapatan. Akibatnya, dengan pendapatan yang sama/tetap, barang ataupun jasa yang dapat mereka konsumsi menjadi berkurang. Kelompok masyarakat ini pun semakin berkurang tingkat kesejahtraannya dan semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Bagi mereka yang berada di kelompok rentan/hampir miskin (memiliki pendapatan perkapita yang mendekati garis kemiskinan), hal yang sama juga dapat terjadi. Hal ini mengakibatkan mereka pun terbenam ke bawah dan ikut masuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Pada akhirnya, jumlah penduduk miskin pun meningkat.

Padatingkat korporatangkainflasidapatdipakaiuntukperencanaanpembelanjaan dankontrabisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angkainflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

Secara spesifik angka inflasi dapat digunakan untuk bahan dalam melakukan kajian atau analisis berkaitan dengan:

- a. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*Wage Indexation*)
- b. Penyesuaian Nilai Kontrak (*Contractual Payment*)
- c. Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*)
- d. Penentuan Target Inflasi (*Inflation Targeting*)
- e. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Budget Indexation*)
- f. Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP Deflator*)
- g. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*Proxy of cost of living*)
- h. Indikator tingkat bunga, nilai tukar, dan indeks harga saham.

### 1.2 Determinan Inflasi

Ada 3 faktor yang menjadi penyebab timbulnya inflasi, yakni :

**Pertama**, karena adanya tekanan dari sisi penawaran/supply (*cost push inflation*). Tekanan ini bisa disebabkan depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

**Kedua**, karena adanya tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*). Tekanan ini terjadi karena tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output riil* yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.

**Ketiga**, karena adanya tekanan dari sisi ekspektasi inflasi. Tekanan ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat *adaptif* atau *forward looking*.

Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR).

Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi supply-demand tersebut.

Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan

harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

### 1.3 Konsep Dan Definisi Terkait

**Inflasi IHK** atau **inflasi umum** (*headline inflation*) adalah inflasi seluruh barang/jasa yang dimonitor harganya secara periodik.

Inflasi umum adalah komposit/gabungan dari :

#### a. Inflasi Inti,

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:

1. Interaksi permintaan-penawaran
2. Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
3. Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

#### b. Inflasi Non Inti

Komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :

1. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Goods*) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan.

2. Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

**Harga Konsumen (HK)** adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen) secara eceran dengan pembayaran tunai. Eceran yang dimaksud adalah membeli suatu barang atau jasa dengan menggunakan satuan terkecil untuk dipakai/dikonsumsi.

**Komoditas** adalah jenis barang/jasa yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat kota tersebut; harganya dapat dipantau secara terus menerus dalam jangka waktu relatif lama; dan mempunyai persentase nilai konsumsi terhadap total konsumsi dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu bulan), minimum sebesar 0,02 persen.

**Kualitas atau merek barang** merupakan spesifikasi barang. Satu macam barang dan jasa umumnya mempunyai lebih dari satu kualitas/merek.

**Pedagang eceran** adalah pihak kata seseorang yang menjual barang dan jasa kepada pembeli untuk

dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperdagangkan kembali.

**Relatif Harga (RH)** adalah rasio perbandingan harga suatu komoditi pada suatu periodewaktu tertentu terhadap harga pada periodewaktu sebelumnya.

**Diagram timbangan** adalah diagram yang menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap jenis barang/jasa terhadap total rata-rata pengeluaran sekaligus mencerminkan pola konsumsi rumah tangga di suatu kota.

**Nilai konsumsi** adalah jumlah nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditi untuk dikonsumsi. Nilai konsumsi suatu komoditi merupakan perkalian harga komoditi dengan banyaknya yang dikonsumsi pada periodedasar.

Dalam Penghitungan IHK ada 2 jenis nilai konsumsi:

1. Nilai konsumsi dasar ( $P_0Q_0$ ) yang diperoleh dari hasil SBH 2012 yaitu rata-rata nilai pengeluaran rumah tangga sebulan untuk setiap jenis barang/jasa yang dikonsumsi.
2. Nilai konsumsi pada bulan berjalan ( $P_nQ_0$ ) yang diperoleh dengan jalan mengalihkan harga bulan berjalan dengan kuantitas konsumsi pada tahun dasar. Di dalam praktik, perhitungannya dilakukan secara bertahap dengan jalan menggunakan Relatif Harga (RH).

**Indeks Harga Konsumen** adalah indeks yang diperoleh dari hasil perbandingan nilai konsumsi pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi dasar. Angka indeks ini nantinya sebagai dasar perhitungan inflasi.

Formulasi indeks yang digunakan untuk menghitung IHK masing-masing kota di atas dapat dijabarkan sebagai **Formula Laspeyres** dengan modifikasi sebagai berikut:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times 10$$

dimana:

- $I_n$  : Indeks bulan berjalan
- $P_{ni}$  : Harga suatu jenis barang pada bulan berjalan
- $P_{(n-1)i}$  : Harga suatu jenis barang pada bulan sebelumnya
- $P_{(n-1)i} Q_{0i}$  : Nilai konsumsi suatu jenis barang pada bulan sebelumnya
- $P_{0i} Q_{0i}$  : Nilai konsumsi suatu jenis barang pada tahun dasar
- $k$  : Jumlah jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas kota yang bersangkutan.

Indeks subkelompok dari Relatif Harga (RH) suatu komoditas diperoleh dengan membandingkan harga konsumen bulan bersangkutan dengan bulan sebelumnya. Kemudian Relatif Harga (RH) suatu komoditas dimaksud dikalikan dengan nilai konsumsi bulan

sebelumnya untuk komoditas yang sama, hasilnya adalah nilai konsumsi komoditas bulan bersangkutan.

Selanjutnya nilai konsumsi dari beberapa komoditas yang tercakup dalam satu subkelompok dikumulatitkan hasilnya disebut nilai konsumsi sub kelompok, kemudian dibagi dengan kumulatif nilai konsumsi tahun dasar dari beberapa komoditas yang yang tercakup dalam subkelompok tersebut dan hasilnya dikalikan 100, maka diperoleh indeks subkelompok. Apabila nilai konsumsi subkelompok yang tercakup dalam suatu kelompok dikumulatitkan maka disebut sebagai nilai konsumsi kelompok.

Nilai Konsumsi Kelompok dibagi dengan kumulatif nilai konsumsi tahun dasar dari beberapa subkelompok yang sama yang tercakup dalam kelompok tersebut dan hasilnya dikalikan 100 diperoleh indeks kelompok. Nilai konsumsi kelompok dikumulatitkan disebut nilai konsumsi umum. Nilai konsumsi umum yang dibagi dengan kumulatif nilai konsumsi umum tahun dasar dari beberapa kelompok dan lalu hasilnya dikalikan 100, maka diperoleh indeks umum.

## BAB II INFLASI 2014

### 2.1 Inflasi Bulanan

Laju inflasi tahunan untuk tahun 2014 (*year on year*) yang merupakan perubahan IHK antara bulan Desember 2014 terhadap bulan Desember 2013 di Kota Banda Aceh sebesar 7,83 persen, lebih kecil dibandingkan Meulaboh sebesar 8,20 ataupun Kota Lhokseumawe sebesar 8,53 persen. Angka ini juga masih lebih kecil dari inflasi nasional yang mencapai 8,36 persen.

Inflasi ini mengalahkan inflasi tahun sebelumnya, tahun 2013, sebagai inflasi tahunan tertinggi sejak tahun 2008 yang mencapai 10,27 persen. Inflasi yang tinggi ini juga meruntuhkan semakin menjelaskan kecenderungan perubahan tingkat harga di Kota Banda Aceh yang semakin membesar.

**Tabel : 2.1 Inflasi Bulanan Kota Banda Aceh, Meulaboh, Kota Lhokseumawe, dan Nasional (persen), 2014**

Bulan	Banda Aceh	Meulaboh	Lhokseumawe	Aceh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	1,85	2,67	2,42	2,23
Februari	-0,45	-1,28	-0,88	-0,84
Maret	-0,52	-0,73	-0,77	-0,65
April	-0,15	-0,06	-0,01	-0,08
Mei	0,86	0,42	1,16	0,80
Juni	0,40	0,20	0,17	0,27
Juli	1,23	2,41	1,34	1,41
Agustus	0,06	0,68	0,27	0,20
September	0,47	0,58	0,50	0,49
Oktober	0,38	0,82	0,53	0,48
November	1,28	1,08	1,60	1,35
Desember	2,19	1,17	1,95	1,99
<b>2014</b>	<b>7,83</b>	<b>8,20</b>	<b>8,53</b>	<b>8,09</b>
<b>2013</b>	<b>6,39</b>			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Mencermati perkembangan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2014, deflasi sempat terjadi tiga bulan berturut-turut pada Februari, Maret, dan April di ketiga kota yakni Kota Banda Aceh, Meulaboh, dan Lhokseumawe. Deflasi ini sesungguhnya terjadi disebabkan tingkat harga yang sudah terlalu tinggi sebagai efek psikologis inflasi pada bulan-bulan sebelumnya akibat kenaikan BBM di akhir tahun 2013.

Inflasi kembali terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Inflasi yang cukup besar kembali terjadi akibat peristiwa tahunan yakni bulan puasa. Meski demikian, inflasi terbesar terjadi di akhir tahun sebagai akibat diberlakukannya kenaikan BBM. Inflasi terakhir inilah yang menyeret inflasi tahun 2014 menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun 2013.

Inflasi pada bulan **Januari 2014** utamanya didorong oleh kenaikan harga pada kelompok Bahan Makanan dimana kelompok ini mengalami inflasi sebesar 4,98 persen yang mengakibatkan inflasi umum berada di tingkat 1,85 persen. Dorongan kelompok Bahan Makanan ini terus berlanjut pada bulan **Februari 2014** namun dengan arah sebaliknya. Besaran deflasi yang cukup di kelompok Bahan Makanan (2,15 persen) menyebabkan terjadinya deflasi secara umum pada angka 0,45 persen. Hal ini menjadikan bulan tersebut sebagai bulan deflasi pertama kali di tahun 2014.

Dorongan deflasi pada kelompok Bahan Makanan menyebabkan deflasi barang dan jasa secara umum kembali terjadi di bulan **Maret 2014** sebesar 0,52 persen. Deflasi ini dipicu oleh deflasi pada kelompok Bahan Makanan sebesar 3,43 persen.

Deflasi pada kelompok Bahan Makanan masih terus terjadi hingga **April 2014**. Kalo ini deflasi sebesar 1,82 persen sedikit terbantu oleh deflasi pada kelompok sandang sebesar 0,41 persen. Pada bulan ini, harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang mengakibatkan deflasi sebesar 0,15 persen. Deflasi pada kelompok Bahan Makanan berturut-turut selama tiga bulan ternyata mampu membuat deflasi secara umum juga selama tiga bulan.

Deflasi selama tiga bulan berturut-turut pada Kelompok Bahan Makanan mengakibatkan penyesuaian harga yang cukup tinggi pada bulan berikutnya, terutama pada Subkelompok Sayur-Sayuran dan Bumbu-Bumbuan. Pada bulan **Mei 2014** inflasi kembali terjadi secara umum sebesar 0,86 persen yang terutama diakibatkan inflasi sebesar 3,91 persen pada kelompok Bahan Makanan serta Kelompok Sandang sebesar 0,15 persen.

Di bulan **Juni 2014**, inflasi sebesar 0,40 persen disebabkan pengaruh kenaikan harga pada Sandang sebesar 1,31 persen. Kenaikan ini tampaknya bagian dari persiapan menjelang Puasa dan Lebaran.

Pengaruh Puasa dan Lebaran baru tampak terjadi pada bulan **Juli 2014**. Inflasi sebesar 3,00 persen pada Kelompok Sandang membantu inflasi pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 3,97 persen memberikan pengaruh untuk menjadikan inflasi secara umum sebesar 1,23 persen. Pengeluaran masyarakat untuk konsumsi bahan makanan, makanan jadi, pakaian baru untuk puasa dan persiapan lebaran mengakibatkan kenaikan harga menjadi suatu

keniscayaan. Pada saat inilah kelompok sandang menjadi komoditas yang diburu untuk persiapan Lebaran. Pada bulan ini, semua kelompok komoditas mengalami inflasi.

Inflasi tinggi menyambut puasa dan lebaran yang terjadi di bulan sebelumnya mengakibatkan terjadinya deflasi pada Kelompok Bahan Makanan dan Sandang. Meski demikian inflasi tetap terjadi di bulan **Agustus 2014** sebesar 0,06 persen akibat kenaikan harga pada Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,36 persen. Perubahan harga yang kecil ini disebabkan deflasi dengan besaran serupa juga terjadi pada Kelompok Bahan Makanan.

Inflasi terus berlanjut pada bulan **September 2014**. Inflasi sebesar 0,47 persen dipicu oleh kenaikan harga pada Kelompok Bahan Makanan dan Kelompok Perumahan, Air Listrik, Gas, dan Bahan Bakar. Sementara itu Kelompok Sandang masih berlanjut deflasi.

Kondisi yang nyaris sama kembali terjadi di bulan **Oktober 2014**. Inflasi masih terjadi sebesar 0,38 persen yang kembali dipicu oleh kenaikan harga pada Kelompok Bahan Makanan dan Kelompok Perumahan, Air Listrik, Gas, dan Bahan Bakar. Sementara itu Kelompok Sandang masih berlanjut deflasi. Sampai bulan ini, inflasi tahun kalender, yakni perubahan harga Oktober 2014 terhadap Desember 2013 masih sebesar 4,19 persen.

Inflasi kembali mendapatkan momentumnya yang diakibatkan kenaikan harga BBM pada 18 November 2014 pukul 00.00 WIB. Inflasi terjadi begitu terasa yang mendorong kenaikan harga sebesar 4,15 persen pada Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan 1,76 persen pada Kelompok Bahan Makanan. Subkelompok Transport dan Bumbu-bumbuan menjadi kontributor terbesar inflasi bulan tersebut. **Bulan November 2014** inflasi mencapai 1,28 persen. Inflasi yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena kenaikan BBM terjadi di pertengahan bulan.

Pengaruh kenaikan BBM sesungguhnya baru terasa pada bulan **Desember 2014**. Inflasi dipicu oleh kenaikan tingkat harga komoditas hampir di semua kelompok pengeluaran, tertinggi masih di Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 5,21 persen serta Kelompok Bahan Makanan di kelompok Bahan Makanan sebesar 4,37. Pada bulan inilah Kedua Kelompok Komoditas mengalami kenaikan harga bulanan tertinggi selama tahun 2014.

## 2.2 Laju Inflasi

Laju inflasi cukup tinggi yang diakibatkan oleh kenaikan BBM seperti yang terjadi pada tahun 2013 kembali terjadi pada tahun 2014.

**Tabel : 2.2 Perbandingan Laju Inflasi Akibat Kenaikan BBM di Kota Banda Aceh, 2005; 2008; dan 2013 serta 2014**

Tahun	Harga (Rp)		Persentase Kenaikan Harga		Laju Inflasi
	Premium (Ron 88)	Solar	Premium (Ron 88)	Solar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2005</b>	2.400	2.100	-	-	
<b>2008</b>	4.500	4.300	87,50	104,76	10,27
<b>2013</b>	6.500	5.500	44,44	27,91	6,39
<b>18 November 2014</b>	8.500	7.500	30,77	36,36	7,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Bila merujuk langsung pada komoditas tertentu, komoditas Bensin itu sendiri menyumbang 0,801 poin dari besaran inflasi tahun 2014 sebesar 7,83 persen. Komoditas berikutnya sebagai penyumbang inflasi terbesar adalah Tongkol sebesar 0,315 poin dan Uang Basah sebesar 0,193 poin serta Tarif Listrik sebagai salah satu komoditas yang diatur pemerintah sebesar 0,127 poin.

Cabe Merah dan Tomat Sayur justru menyumbang deflasi bagi harga komoditas secara umum. Cabe Merah menyumbangkan -0,070 poin sedangkan Tomat Sayur sebesar -0,067 poin.

### 2.3 Perbandingan Regional

Laju inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun hal ini juga terjadi pada kota-kota lainnya di Pulau Sumatera.

Tercatat bahwa inflasi yang dialami Kota Banda Aceh pada tahun 2014 menjadi kelima terendah setelah Batam dari 22 kota lainnya di Sumatera yang turut dihitung inflasinya. Hal ini cukup disayangkan setelah keberhasilan Kota Banda Aceh menjadi peringkat pertama untuk inflasi terendah pada tahun 2012 dan 2013.

Pada tahun 2014, Kota Metro di Provinsi Lampung menjadi kota inflasi terendah di Pulau Sumatera dengan inflasi sebesar 6,50 persen.

LAMPIRAN

**Lampiran 1**

Berdasarkan tingkat volatilitas harga komoditas barang/jasa, maka pengumpulan data harga komoditas barang/jasa yang dilakukan BPS menggunakan daftar dan periode waktu yang berbeda-beda seperti tabel di bawah ini:

**Daftar Isian yang Digunakan dalam Pencacahan Harga Konsumen**

<b>Jenis Daftar</b>	<b>Frekuensi Pencacahan</b>	<b>Hari Pencacahan</b>	<b>Lamanya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-1.1	Mingguan	Senin dan Selasa	2hari
HK-1.2	Dua Mingguan	Rabu dan Kamis dalam Minggu & III	2hari
HK-2.1	Bulanan	Mulai hari Selasa yang terdekat dengan Tanggal 15, sampai dengan hari Kamis	3hari
HK-2.2	Bulanan	Awal bulan, tanggal 5 s.d. 15	10hari
HK-3	Bulanan	Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10	10hari
HK-4	Bulanan	Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10	10hari
HK-5	Bulanan	Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10	10hari
HK-6/A/B/C	Bulanan	Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10	10hari

**Penjelasan Tabel :****Daftar HK-1.1**

Daftar isian digunakan untuk mencatat data HK komoditi yang harganya sering berubah atau mempunyai fluktuasi harga relatif tinggi. Pencacahannya dilakukan pada hari Senin dan Selasa (2 hari) setiap minggu. Khusus untuk komoditi beras, jenis kualitas yang dimonitor diperoleh dari survei khusus yaitu Survei Volume Penjualan Eceran Beras. Survei ini dilakukan dua kali dalam setahun.

**Daftar HK-1.2**

Daftar isian ini digunakan untuk mencatat data HK komoditi yang harganya tidak sering berubah. Pencacahannya dilakukan 2 kali setiap bulan yaitu pada hari Rabu dan Kamis (2 hari) minggu dan III. Yang disebut Minggu adalah minggu di mana tanggal 1-nya jatuh pada hari Senin atau Selasa. Jika tanggal 1 jatuh pada hari Rabu, Kamis dan seterusnya maka tidak dianggap minggu.

**Daftar HK-2.1**

Daftar isian digunakan untuk mencatat data HK komoditi yang harganya sering berubah atau mempunyai fluktuasi harga relatif tinggi. Pencacahannya dilakukan pada hari Senin dan Selasa (2

hari) setiap minggu. Khusus untuk komoditi beras, jenis kualitas yang dimonitor diperoleh dari survei khusus yaitu Survei Volume Penjualan Eceran Beras. Survei ini dilakukan dua kali dalam setahun.

**DaftarHK-2.2**

Daftar isian ini digunakan untuk mencatat HK komoditi bukan makanan. Pencacahannyadilakukan sebulan sekalidimulai tanggal 5 s.d 15.

**DaftarHK-3**

DaftarisianinidigunakanuntukmencatatdataHKkomoditatarifjasa-jasa,bahan bangunan, perlengkapanrumah tangga,alat elektronik, suku cadang kendaraan dan sebagainya. Pencacahannyadilakukan sebulan sekalidimulai tanggal 1 s.d.10.

**DaftarHK-4**

Daftarisian ini digunakan untuk mencatat harga sewa dan kontrak rumah. Pencacahannya dilakukansebulan sekalidimulaitanggal1s.d.tanggal10.Kualitasrumah yangdimonitorhargasewa/kontraknyadiperolehdarihasilsurveiyangdinamakansurvei sewadan kontrak rumahyangdilaksanakan secara insidental.

**DaftarHK-5**

Daftarisianinidigunakanuntukmencatattarif/upahpembanturumah tanggajasaja.

Pencacahannyadilakukan sebulan sekalimulai tanggal 1 s.d. tanggal 10.

Klasifikasipembanturumah tanggayangdimonitorjugadiperolehdari survei pembantu rumah tanggayangdilakukan secara insidental.

**DaftarHK6A, B danC**

Daftarisianinidigunakanuntukmencatatuangsekolahmaupunuangkuliah.Daftar initerdiridari3macam,yaitudaftarHK6Auntukmencatatuangsekolahdasaratauyang

setingkat,daftarHK6Buntuk mencatatuangsekolahmenengah(SLTPdanSMU)atau setingkat dan daftar HK 6C untuk mencatat uang kuliah tingkat perguruan tinggi atau akademi.

Pencacahannyadilakukansebulan sekalidimulaitanggal1Sampai dengantanggal10.Kualitas sekolahyangdimonitoruangsekolahnyadiperolehdarihasilsurveiuangsekolahyangjuga dilaksanakan secara insidental.

**Lampiran 2**

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose - COICOP*) dan 35 subkelompok barang/jasa sebagai berikut:

**I. Bahan Makanan**

- a. Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya
- b. Daging dan hasil-hasilnya
- c. Ikan segar
- d. Ikan diawetkan
- e. Telur, susu dan hasil-hasilnya
- f. Sayur-sayuran
- g. Kacang-kacangan
- h. Buah-buahan
- i. Bumbu-bumbuan
- j. Lemak dan minyak
- k. Bahan Makanan lainnya

**II. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau**

- a. Makanan jadi
- b. Minuman yang tidak beralkohol
- c. Tembakau dan minuman beralkohol

**III. Perumahan**

- a. Biaya tempat tinggal
- b. Bahan bakar, penerangan, dan air
- c. Perlengkapan rumah tangga
- d. Penyelenggaraan rumah tangga

**IV. Sandang**

- a. Sandang laki-laki
- b. Sandang wanita
- c. Sandang anak-anak
- d. Barang pribadi dan sandang lainnya

**V. Kesehatan**

- a. Jasa kesehatan
- b. Obat-obatan
- c. Jasa perawatan jasmani
- d. Perawatan jasmani dan kosmetik

**VI. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga**

- a. Pendidikan
- b. Kursus-kursus
- c. Perlengkapan/peralatan pendidikan
- d. Rekreasi
- e. Olah Raga

**VII. Transportasi dan Komunikasi**

- a. Transportasi
- b. Komunikasi dan pengiriman
- c. Sarana penunjang transportasi

## d. Jasakeuangan

**Lampiran 3****Jumlah Barang/Jasa yang Masuk ke dalam Paket Komoditas Indeks Harga Konsumen (IHK)  
Kota Banda Aceh Menurut Kelompok Pengeluaran, (2002, 2007,2012)**

Kelompok Pengeluaran		2002	2007	2012*
	<b>Umum</b>	<b>327</b>	<b>342</b>	<b>383</b>
1.	Bahan Makanan	98	102	108
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok,&Tembakau	35	39	49
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	54	64	67
4.	Sandang	52	44	55
5.	Kesehatan	29	29	33
6.	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	29	34	36
7.	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	30	30	35

Keterangan: \*) Diagram Timbang dan Paket Komoditas hasil IHK 2012 mulai digunakan untuk perhitungan inflasi sejak bulan Januari 2014.

**Lampiran 4****Komoditas Volatile Goods\***

CABE MERAH	KERAPU	MINYAK GORENG	TELUR AYAM RAS
DAGING AYAM RAS	TERONG PANJANG	IKAN ASIN BELAH	APEL
UDANG BASAH	TONGKOL	SUSU BUBUK	SABUN DETERGEN BUBUK
KEMBUNG/GEMBUNG	DENCIS	JERUK NIPIS/LIMAU	KANGKUNG
CABE HIJAU	CUMI-CUMI	TOMAT BUAH	SABUN CAIR/CUCI PIRING
RAMBE	TOMAT SAYUR	ANGGUR	DAGING SAPI
BERAS	TERI	MUJAIR	BAYAM
TERI	WORTEL	GULA PASIR	GULA MERAH
BUAH MELINJO/MELINJO MENTAH	DAUN BAWANG	DAUN SELEDRI	SUSU UNTUK BALITA
BAWANG MERAH	DAGING AYAM KAMPUNG	TAUGE/KECAMBAH	SUSU UNTUK BAYI
IKAN KAYU	DAUN MELINJO	KOL PUTIH/KUBIS	BLENDER
KETIMUN	KAKAP MERAH	JAHE	SEMANGKA
CABE RAWIT	BUNCIS	SELADA/DAUN SELADA	SAWI HIJAU
EMAS PERHIASAN	BAWANG PUTIH	KEMBANG KOL	LADA/MERICA
BANDENG	KACANG TANAH	PEPAYA	SUSU UNTUK TULANG/MANULA
EMPING MENTAH	JERUK	ALPUKAT	
KACANG PANJANG	CUMI-CUMI	KULKAS/LEMARI ES	
JAGUNG MUDA	KENTANG	SIROP	

\*) Komoditas barang/jasa dengan harga yang bergejolak

**Lampiran 5****Komoditas Administered Price\***

1. Rokok Kretek	12. Solar
2. Rokok Kretek Filter	13. Tarif Taksi
3. Rokok Putih	14. Biaya Kirim SURat
4. Tarif Air Minum PDAM	15. Tarif Telepon
5. Tarif Listrik	16. Biaya Telepon di Wartel
6. Bahan Bakar Rumah Tangga	17. Biaya Pembuatan SIM
7. Tarif Puskesmas	18. Tarif Jalan Tol
8. Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan	19. Tarif Parkir
9. Angkutan Dalam Kota	20. Jasa Pembuatan SIM
10. Angkutan Laut	21. Jasa Perpanjangan STNK
11. Bensin	

\*) Komoditas barang/jasa yang harganya diatur pemerintah



